

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI TAHUN 2015**

By:

Fitri Wulan Sundari

Supervisor: **Drs. Ishak, M.Si**

Email : fitriwulansundari@gmail.co.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fak. 0761-63277

Abstract

The regency is a division of Kampar, which was established by Act No. 53 of 1999. Initially composed of four sub-districts. Sub-district Pangkalan Kerinci is the capital of Pelalawan. Basically the success of an election is determined by several things these include the voter, which is one characteristic of a democratic government that is a government based on community participation.

The concept of the theory that researchers use is participation. said participation comes from the word to Participate, which can be interpreted to participate. According to Tosun participation can create community, the various activities, both local and national scale. Participation means participation of a person or group of people in the development process in the form of a statement.

This study uses qualitative research methods with an assessment of descriptive data. In collecting the data, researchers use interviewing techniques, observation and studi kepustakaan. By using key informants and informant as a supplementary source of information.

The results of this study indicate that factors affecting the low turnout in the election of the Regent and Vice Regent in the District of Pangkalan Kerinci Pelalawan are technical factors, employment, socialization, administrative factors and political factors.

Keywords: Causes Low Voter Participation

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan

itu, rakyat memiliki kesempatan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom). (Joko J. Prihatmoko:2005:98)

Sistem Pilkada secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi

politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floating mass (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. (Agus Yusoof dan Andi Yusran:2005:50)

Cukup banyak peraturan perundang-undangan yang sudah dilahirkan tentang pemilihan Kepala Daerah ini. Yang paling terakhir adalah Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak. Aturan yang pertama kali mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini maka sistem Kepala Daerah mengalami perubahan, yang dahulunya Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi dengan lahirnya Undang-Undang tersebut Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

Pembangunan sistem politik yang demokratis dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat. Karena hanya dengan partisipasi politik, maka hasil keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil keputusan politik akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan sistem politik adalah adanya partisipasi politik. (Suko Susilo:2003:71)

Perilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Maka, perilaku pemilih masyarakat akan menjadi penentu yang penting pula. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah ternyata dapat dilihat bahwa masyarakat tidak terlalu ikut

ambil bagian di dalamnya, misalnya dapat kita perhatikan dengan tingginya angka DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya atau sering disebut dengan golput atau non voting, berarti pemilihan Kepala Daerah tersebut kurang berhasil pelaksanaannya.

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri dari 4 Kecamatan, yakni : Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (Sembilan) kecamatan pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (Sembilan) Kecamatan, yang terdiri atas 4 Kecamatan induk dan 5 Kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Pelalawan. Yang mana seharusnya tingkat partisipasi politiknya lebih tinggi dari 11 Kecamatan lainnya. Sebab, dimana Pangkalan Kerinci ini merupakan daerah yang terletak dititik kota di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan info yang didapat penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci ini rata-rata penduduknya tidak asli dari masyarakat Pangkalan Kerinci sehingga mereka lebih memilih untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di kota asal mereka.

Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri dari atas 12 wilayah Kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Dalam Pilkada tahun 2015 ini, bahwa Pangkalan Kerinci yang mempunyai persentase jumlah pemilih

yang paling terkecil dari 12 Kecamatan yaitu 65,7% dari Kecamatan yang lainnya yang mana Daftar Pemilih Tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Pangkalan Kerinci ini mempunyai yang sangat besar dibanding dengan 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Pada dasarnya kesuksesan sebuah pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang diantaranya menyangkut pemilih yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokratis yaitu pemerintah yang didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik ditingkat nasional hingga tingkat daerah melewati pemilihan umum.

Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci juga rendah pada saat Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur.

Undang-Undang menegaskan penetapan DPT merupakan jaminan atas hak pilih seluruh warga Negara. Sehingga menjadi cacat hukum jika setelah DPT ditetapkan masih ada warga Negara yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan haknya karena masalah administrasi atau masalah lainnya seperti di Kabupaten Pelalawan yang mana terdapat perusahaan-perusahaan industri yang tidak memberikan hari libur untuk para karyawannya pada saat pemilihan dan banyaknya masyarakat asli dari daerah itu sendiri berada diluar daerah sehingga banyak masyarakat yang tinggal di Kabupaten Pelalawan bukan penduduk asli kemudian pada hari H pemilihan lebih memilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan dikampung halamannya.

Jumlah pemilih merupakan hal yang penting untuk melihat seberapa besar partisipasi warga dalam berpolitik. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai persentase pemilih yang memberikan suara pada Pemilu maupun Pilkada. Rendahnya partisipasi pemilih tidak hanya menjadi kerisauan dari penyelenggara pemilihan

dan tidak juga menjadi gejala yang sifatnya lokal.

Dari data yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa, dengan jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih yang mencapai 51,5% untuk kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan 61.3% untuk kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Hal ini tentu sangat disayangkan karena dengan jumlah TPS yang disediakan, akan tetapi jumlah yang tidak memilih begitu banyak, hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi KPU apakah data pemilih yang telah ditetapkan sudah benar-benar akurat.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang sifatnya kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga Negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga Negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Dalam hubungan dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Perwujudan demokrasi ditingkat lokal, salah satunya adalah melaksanakan pemilukada didaerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi (pilkada) di Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan awal Desember 2015. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pilkada ada yang tidak menggunakan hak pilihnya dan cenderung meningkat disetiap pelaksanaan pilkada. Perilaku tidak memilih di Indonesia dikenal dengan golput.

Untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Kerinci dalam pilkada

Kabupaten Pelalawan 2015, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : “ *Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015* “

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perspektif partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang atau pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Pilkada Kecamatan Pangkalan Kerinci dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori.

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian kualitatif deskriptif ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer. Adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu para pihak yang dijadikan informan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder. Adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori partisipasi politik, perilaku pemilih dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian..

2. Sumber Data

Data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan wawancara dan data lain untuk melengkapi serta mendukung penulisan terkait dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	PPK	1
2	PPS	1
3	KPPS	1
4	Masyarakat Kel. Pangkalan Kerinci Kota	15
5	Masyarakat Kel. Pangkalan Kerinci Timur	11
		29

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yg dihasilkan di gunakan untuk menjawab memecahkan masalah yang ada. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian antara lain :

a. Interview (wawancara)

Menurut Budiono, metode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan antar peneliti dengan subjek penelitian atau responden atau sumber data. Dalam hal ini pewawancara menggunakan percakapan sedemikian sehingga yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya. Dalam penelitian ini orang yang diwawancarai adalah masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen yaitu bahan tertulis baik internal maupun eksternal

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tanpa menggunakan alat bantu atau rumus statistik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan situs-situs yang memuat tentang perilaku pemilih dan partisipasi politik.
- b. Kedua, penilaian atau menganalisa data. Dalam tahap ini setelah peneliti mengumpulkan dan mendapatkan semua data yang mendukung atau membantu dan sangat dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis akan menelaah, kategorisasi, melakukan tabulasi data dan atau mengkombinasi bukti untuk menjawab pertanyaan peneliti.
- c. Ketiga, penyimpulan data yang diperoleh. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam penelitian. Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan yang lebih bermanfaat dalam memahami penelitian ini

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berbagai penjelasan mengenai ketidakikutsertaan (golput) setiap kali dalam pemilu di Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara Pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset atau hasil penelitian.

Berdasarkan beberapa teori yang peneliti pahami hingga saat ini, ada

sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab rendahnya partisipasi pemilih. *Pertama*, faktor internal yaitu terdiri dari masalah masalah teknis dan pekerjaan. *Kedua*, adalah faktor eksternal yang terdiri dari faktor administrasi, sosialisasi dan politik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian berikut ini :

A. Faktor Internal

1. Faktor Teknis

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, alasan mereka tidak ikut memilih adalah :

Tabel. 3.1 Alasan Informan Faktor Teknis

Jumlah yang Diwawancara	Alasan Tidak Memilih		
	Sakit	Ada kegiatan lain	Lagi diluar kota
29	13	10	6

Sumber : Data Olahan, 2016

Berikut dipaparkan hasil wawancara dari perwakilan informan yang di wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PPK Kabupaten Pelalawan, saat ditanyakan mengenai pengaruh urusan pribadi terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik pada saat Pilkada pada tahun 2015 yang lalu, beliau menjawab:

Kalau saya lihat, kebanyakan para pemilih tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada kali ini dikarenakan dari urusan pribadi mereka. Ya.... Rata-rata alasan dari mereka adalah karena factor pekerjaan, factor ada urusan di luar kota, ada yang beralasan sakit dan banyak lagi. Tapi rata-rata dari masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak bias meninggalkan pekerjaan mereka, karena tidak mendapat izin dari atasan mereka (Wawancara, 15 Oktober 2016)

Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun yaitu bapak Deni, saat ditanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Beliau mengatakan bahwa:

“salah satu faktor rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci kalau menurut saya mungkin lebih karena pekerjaan dari masyarakat, dimana mereka beranggapan, ah dari pada saya repot-repot memilih lebih baik saya berjualan kan dapat meningkatkan pendapatan”. (Wawancara, 15 Oktober 2016)

Sedangkan menurut ketua PPK yaitu bapak Husnan saat ditanya mengenai permasalahan yang sama bapak Husnan mengatakan bahwa:

Faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi politik sebenarnya ada banyak, pertama kalau saya lihat lebih kepada kurangnya kepedulian masyarakat tentang hak politik yang dimiliki, mereka beranggapan tidak ada manfaat menggunakan hak politik tersebut. Kadang-kadang juga, masyarakat itu beranggapan suara saya cuma satu dan itu tidak akan berpengaruh jadi lebih baik saya tidak memilih dan lebih memilih untuk bekerja atau alasan lainnya seperti lagi sakit dan banyak lagi. (Wawancara, 16 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci seperti, Juni saat ditanya mengapa dia tidak memilih pada saat pemilihan bupati pada tahun 2015, dia mengatakan bahwa

“pada saat pemilihan bupati saya lebih memilih untuk beristirahat dirumah soalnya saya dalam keadaan tidak enak badan, jadi malas mau datang ke TPS”, (Wawancara, 17 Oktober 2016)

Hal serupa juga disampaikan oleh Edi dimana saat ditanya mengenai permasalahan yang sama ia mengatakan bahwa

“saya tidak memilih pada pilkada kali ini karena ada urusan di luar kota sehingga saya tidak memungkinkan untuk pulang ke Kerinci karena akan memakan waktu berjam-jam untuk kesana”. (Wawancara, 17 Oktober 2016)

Berdasarkan pendapat dari beberapa informan diatas tampak jelas bahwa informan tidak berminat terhadap kegiatan politik yang sedang berlangsung dan adanya alasan yang bermacam-macam, mulai dari alasan sakit, ada urusan pribadi dan sedang berada di luar kota. Tentu sikap masyarakat ini tidak bisa disalahkan dimata hukum mengingat tidak ada dalam undang-undang Republik Indonesia yang melarang seseorang yang tidak ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukukan oleh negara khususnya kegiatan pilkada, bahkan negara Indonesia menjamin Hak Asasi dari setiap warganya termasuk Hak untuk tidak memilih pada saat Pilkada.

2. Faktor Pekerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, alasan mereka tidak ikut memilih adalah :

Tabel. 3.2 Alasan Informan Faktor Pekerjaan

Jumlah yang Diwawancara	Alasan Tidak Memilih		
	Pekerjaan	Tidak dapat izin	Jaga Toko

29	15	5	9
----	----	---	---

Sumber : Data Olahan, 2016

Berikut dipaparkan hasil wawancara dari perwakilan informan yang di wawancara.

Menurut bapak Zulkifli yang sehari-harinya bekerja disalah satu gudang, saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Bupati tahun 2015, menurut bapak Zulkifli:

“Pada saat pemilihan bupati tahun lalu saya tidak memilih karena saya ada pekerjaan, namanya juga pekerjaan kasar kalau tidak bekerja ya tidak dapat uang, makanya saya lebih memilih bekerja dari pada datang ke TPS, kalau saya datang ke TPS nanti saya terlambat nanti bisa dimarahi”. (Wawancara, 15 Oktober 2016)

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh ibu Siti yang bekerja sebagai karyawan toko, ia mengatakan bahwa:

”saya tidak ada waktu datang ke TPS untuk ikut memilih soalnya saya pagi-pagi sudah harus datang ke toko untuk bekerja”. (Wawancara, 15 Oktober 2016)

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas jelas bahwa alasan ekonomi atau pekerjaan menjadi pertimbangan yang sangat sulit untuk ditinggalkan mengingat pekerjaan yang sedang dijalannya menuntut agar mereka tetap hadir meskipun sedang ada pesta demokrasi yang berlangsung, namun itu tidak menjadi penting jika sudah menjangkut dengan urusan kebutuhah hidup sehari-hari.

Namun bagi sebagaian masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang tingkat perekonominya cukup tinggi faktor

pekerjaan bukan lagi faktor yang langsung menyangkut kepada urusan dapur mereka, namun lebih kepada faktor kerugian yang akan dialami jika mereka ikut serta untuk memilih. Ini terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha sendiri, seperti para pedagang. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu pedagang yaitu ibu Yulia saat ditanya mengenai faktor apa yang mempengaruhi ibu sehingga tidak memilih pada pemilihan Bupati tahun 2015 yang lalu, Ibu Yulia menjawab:

“gimana saya mau ikut milih bang, toko saya saja buka dari pagi sampai sore, ya... dari pada saya datang ke TPS untuk milih lebih baik saya jaga toko”. (Wawancara, 17 Oktober 2016)

Jawaban yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh bapak YO yang bekerja sebagai penjual buah, ia mengatakan:

“saya tidak bisa memilih pada pemilihan Bupati tahun lalu soalnya rumah saya jauh dari tempat saya berjualan. Setiap pagi saya sudah datang ke toko buah saya, jadi saya tidak sempat datang ke TPS untuk memilih”. (Wawancara, 18 Oktober 2016)

B. Faktor Eksternal

1. Faktor Administrasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, alasan mereka tidak ikut memilih adalah :

Tabel. 3.3 Alasan Informan Faktor Administrasi

Jumlah yang Diwawancara	Alasan Tidak Memilih		
	Pindah	KTP	Tidak mendapat undangan
29	10	3	16

Sumber : Data Olahan, 2016

Berikut dipaparkan hasil wawancara dari perwakilan informan yang di wawancara.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Pelalawan saat ditanya mengenai bagaimana pengaruh administrasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada Kabupaten Pelalawan tahun 2015 yang lalu, menurutnya:

Kalau faktor administrasi memang ada pengaruhnya ini diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal kemudian ada pula pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Mengapa itu terjadi misalnya sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT ini dikarenakan keluarga yang bersangkutan itu tidak mengurus yang namanya akte meninggal, sehingga kita dalam keadaan ragu-ragu tidak berani mencoret, karena kalau ternyata orang yang bersangkutan ternyata masih hidup kemudian kita coret itu bisa kena pidana. (Wawancara, 19 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas ketua KPU memang mengakui adanya kesalahan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam hal pemutakhiran data sehingga masih terdapat pemilih yang memiliki daftar pemilih ganda, masyarakat yang pindah tempat tinggal dan masyarakat yang meninggal namun masih terdaftar dalam DPT.

Selain faktor yang disampaikan oleh ketua KPUD mengenai pemilih ganda, pemilih yang berpindah tempat tinggal dan pemilih yang meninggal. Faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan undangan sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Seperti yang disampaikan oleh Bobi Prayoga salah satu tokoh politik dari, saat ditanya faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2015 yang lalu,

“kalau saya lihat ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, pertama kalau saya lihat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, jadi mau tidak mau mereka ini ketidakikutsertaan (golput) karena masyarakat malas untuk mengurus-ngurus kartu undangan tersebut”. (Wawancara, 20 Oktober 2016)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Desa yaitu bapak Chairul saat ditanya mengenai faktor apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati di Kecamatan Pangkalan Kerinci pada tahun 2015 yang lalu, menurut beliau:

Saya akui memang partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci memang rendah ada faktor-faktor yang membuat kerendahan tersebut, terutama masalah pendataan, pendataan itu kalau saya lihat banyak yang tidak sinkron, misalnya saja ada warga yang sudah meninggal namun dapat kartu undangan begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak diberi kartu undangan. Memang masyarakat disini kalau saya lihat jika mereka betul-betul tidak

diberi kartu undangan mereka tidak mau hadir ke TPS. (Wawancara, 20 Oktober 2016)

Berdasarkan pendapat Kepala Kecamatan Pangkalan Kerinci dimana menurutnya jika masyarakat benar-benar tidak mendapat undangan mereka tidak mau hadir ke TPS. Ini sesuai dengan pendapat informan seperti ibu Sri Nursyah saat ditanya mengenai faktor apa yang mempengaruhi ibu sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki pada Pilkada tahun 2015 yang lalu menurutnya

“bagaimana saya mau milih, tidak dapat kartu undangan”.
(Wawancara, 19 Oktober 2016)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Syawal dan bapak Djoko Priyono yang pada intinya mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kartu undangan sehingga tidak datang ke TPS untuk memilih.

Menurut UU No 1 Tahun 2015 Pasal 59 Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

2. Faktor Sosialisasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, alasan mereka tidak ikut memilih adalah :

Tabel. 3.4 Alasan Informan Faktor Sosialisasi

Jumlah yang Diwawancara	Alasan Tidak Memilih		
	Tidak Mengenal Calon	Tidak ada sosialisasi	Kebingungan
29	17	7	5

Sumber : Data Olahan, 2016

Berikut dipaparkan hasil wawancara dari perwakilan informan yang di wawancara.

Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh ketua KPU Kabupaten Pelalawan, yang saat ditanya apakah sebelum pelaksanaan pemilihan bupati ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten. Menurut beliau:

Kalau sosialisasi tentu saja ada, namun karena KPU itu kelembagaan jadi dia bersifat hierarki dimana ada KPU kabupaten kemudian ada PPK kemudian ada PPS dan ada KPPS, nah karena itu cenderungnya yang kita utamakan itu sosialisasinya bersifat hierarki atau terstruktur, KPU ditingkat kabupaten, ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK, kemudian ditingkat desa dilaksanakan oleh PPS dengan mengundang kelompok-kelompok yang berkepentingan misalnya tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik. Nah diluar itu ada juga bentuk-bentuk sosialisasi yang kami lakukan melalui media seperti melakukan talkshow di televisi-televisi lokal,, kemudian pemberitaan di koran-koran dan ada juga dalam bentuk spanduk atau baliho yang pada umumnya bersifat ajakan-ajakan terhadap masyarakat .agar pada hari pemungutan suara mereka mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih yang mereka miliki.
(Wawancara, 20 Oktober 2016)

Pendapat ketua KPU kabupaten ini sesuai dengan pendapat salah satu ketua PPS di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu bapak Nassarudin, yang mengatakan bahwa:

“Kalau dari kami sosialisasinya memang ada namun sosialisasinya hanya bersifat pengetahuan

terhadap ketua RT yang juga sekaligus sebagai ketua KPPS supaya menghibau kepada warganya agar datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya”. (Wawancara, 20 Oktober 2016)

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua KPU Kabupaten Pelalawan dan ketua PPS jelas bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Sosialisasi yang mereka lakukan lebih kepada penghimbau kepada masyarakat agar mau menggunakan hak suara yang dimiliki, selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten juga berbentuk pemberitahuan mengenai tanggal pemungutan suara dilaksanakan.

Dalam hal sosialisasi yang memiliki peran penting sebenarnya bukan KPU melainkan para calon dan partai politik karena para calon yang secara langsung mempunyai kepentingan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih mereka, selain itu partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal ini karena partai politik merupakan kendaraan para calon yang non independen tersebut. Ini sesuai dengan pendapat ketua PPK Kabupaten Pelalawan yang mengatakan:

Sebenarnya dalam Pilkada yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi tidak terletak disosialisasi KPU tapi terletak pada peserta Pilkadanya dan partai politik pengusung para calon karena yang berkepentingan orang hadir ke TPS itu bukan KPU tapi calon yang bersangkutan dan partai pengusung, dimana calon yang bersangkutan mengajak pemilih untuk hadir ke TPS pada saat kampanye semakin tinggi partisipasi pemilih hadir ke TPS semakin efektif kampanye yang dilaksanakan oleh para calon

maupun partai pengusung. (Wawancara, 21 Oktober 2016)

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua KPUD Kabupaten Pelalawan jelas bahwa para calon peserta pemilu dan partai politik pengusung mempunyai kepentingan yang sangat tinggi terhadap kehadiran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Sehingga sosialisasi yang efektif dari partai politik maupun calon akan menimbulkan rasa ketertarikan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat untuk memilih. Menurut salah satu tokoh partai politik yaitu Robudin saat ditanya apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik pada saat Pilkada tahun lalu. Menurutnya:

“kalau sosialisasi tentu saja ada, tapi tidak disemua tempat kita adakan sosialisasi mengingat biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi juga sangat besar”. (Wawancara, 21 Oktober 2016)

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh ketua PAC jelas bahwa dalam sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakat memang kurang efektif mengingat biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, sehingga cenderung masyarakat kurang mengenal para calon peserta pemilu dan visi misi yang ingin disampaikan. Sehingga pada akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka.

Seperti ibu Erni yang saat ditanya alansannya sehingga tidak menggunakan hak pilihnya beliau mengatakan

“soalnya bingung siapa yang mau dipilih”. (Wawancara, 19 Oktober 2016)

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh bapak Acep Mukhtar yang mengatakan:

“saya tidak ikut pemilihan Bupati pada waktu itu soalnya saya tidak

tahu apa program-program yang ingin dilaksanakan oleh para calon, paling yang saya tahu cuma lihat spandukspanduk gambar calon”. (Wawancara, 19 Oktober 2016)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat diatas jelas bahwa mereka kurang mendapatkan sosialisasi mengenai program-program atau visi misi yang ingin disampaikan oleh para calon kandidat sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Dan jika adanya sosialisasi yang mendalam dari para kandidat atau tim sukses kandidat terhadap masyarakat kemungkinan besar masyarakat yang tidak memilih karena faktor ini bisa berubah pikiran dan mau menggunakan hak pilih yang mereka miliki.

Berdasarkan UU NO.1 Tahun 2015 Pasal 58 Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

3. Faktor Politik

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, alasan mereka tidak ikut memilih adalah :

Tabel. 3.5 Alasan Informan Faktor Politik

Jumlah yang Diwawancarai	Alasan Tidak Memilih		
	Tidak Percaya sama Calon	Kurang motivasi	Jenuh
29	19	4	6

Sumber : Data Olahan, 2016

Berikut dipaparkan hasil wawancara dari perwakilan informan yang di wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Pelalawan saat ditanya mengenai bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik pada saat pilkada tahun 2015 yang lalu, beliau mengatakan bahwa

Arti dari pemerintah disini tentu sangat luas, kami (KPU) juga adalah bagian dari pemerintah. Pemerintah disini mungkin lebih kepada pemimpin sebelumnya dan calon-calon yang akan memerintah nanti. Kalau untuk pemimpin yang sebelumnya, menurut saya mungkin masyarakat tidak melihat perubahan yang nyata selama lima tahun pemerintahannya. Sedangkan untuk calon-calon yang baru kelihatannya sebagian masyarakat bersifat pesimis, dalam arti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan siapapun yang akan memimpin nantinya atau dengan kata lain timbulnya kecurigaan dalam diri masyarakat. Faktor ini memang menurut saya merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilkada tahun lalu. (Wawancara, 22 Oktober 2016)

Hal yang tidak jauh berbeda juga di sampaikan oleh salah satu ketua RT di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu bapak Suyatno saat ditanya mengenai faktor penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati tahun 2015 di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Beliau menjawab bahwa:

Faktor yang mengakibatkan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya kalau menurut saya lebih dikarenakan oleh sikap malas dari

masyarakat terhadap sistem pemilukada yang kelihatan hanya sebagai rutinitas lima tahun sekali tidak ada perubahan yang berarti setelah pemilu selesai dilaksanakan. Ini terjadi karena para pemimpin yang pernah duduk dipemerintahan tidak memberikan perubahan yang nyata di mata masyarakat. Sehingga siapapun yang akan tampil sebagai calon pasti timbul sikap keraguan di dalam diri mereka (masyarakat)". (Wawancara, 22 Oktober 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPUD dan salah satu ketua RT diatas dimana para informan merasa bahwa adanya krisis kepemimpinan yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci sehingga menurut informan, masyarakat meragukan kredibilitas yang dimiliki oleh para calon yang tampil apakah nantinya calon yang ada ini bisa mewakili aspirasi mereka untuk kedepannya atau tidak.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Bobi salah satu tokoh politik dari partai politik, saat ditanya mengenai faktor apa yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati tahun 2015 yang lalu, menurutnya :

".....,masyarakat sudah tidak termotivasi lagi untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pilkada karena masyarakat sudah masa bodoh karena masyarakat beranggapan siapapun yang duduk nanti tidak akan berpengaruh terhadap diri mereka". (Wawancara, 20 Oktober 2016)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ekmal salah satu masyarakat, saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilihan Bupati, beliau menjawab:

"Saya melihat tidak ada tokoh dari antara para calon yang mampu membuat perubahan yang nyata bagi daerah Kabupaten Pelalawan ini, paling calon yang duduk nanti hanya mementingkan kepentingan golongannya saja seperti yang sudah-sudah". (Wawancara, 21 Oktober 2016)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Yanto Kurniawan ia mengatakan bahwa:

"saya tidak memilih saat pilkada tahun lalu soalnya saya tidak percaya kepada para calon yang ada, menurut saya mereka hanya ngomong-ngomong manis pada saat kampanye lihat aja nanti kalau mereka sudah terpilih mana ingat dengan janji-janjinya". (Wawancara, 21 Oktober 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang dialami oleh masyarakat sehingga menimbulkan sikap apatis, dimana masyarakat tidak peduli atau masa bodoh dengan kegiatan penyelenggaraan pilkada di daerahnya, sikap ini timbul karena ikut maupun tidak dalam pilkada menurut masyarakat tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Kesadaran politik masyarakat dapat ditingkatkan dengan melakukan pendidikan politik karena dengan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam bentuk ikut serta dalam melaksanakan hak politik pada pilkada.

2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan bupati, dimana masyarakat sebenarnya ingin menggunakan hak politik yang mereka miliki namun karena melihat kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak memberikan perubahan yang nyata sehingga masyarakat meragukan figur-figur yang tampil dalam pemilihan Bupati tahun 2013 yang lalu. Sehingga timbul juga sikap apatis didalam diri masyarakat dimana mereka tidak peduli dengan hak suara yang mereka miliki.
3. Faktor pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan hak politik yang dimiliki, sangat erat kaitannya dengan pekerjaan di sektor informal/swasta, dimana sektor ini sangat mengutamakan intensitas pekerjaan, dimana menurut masyarakat pekerjaan yang mereka geluti sangat berpengaruh terhadap kebutuhan mereka sehari-hari, sedangkan pelaksanaan pilkada tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan mereka sehari-hari, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan yang mereka geluti dari pada datang ke TPS untuk berpartisipasi menggunakan hak suara yang mereka miliki. Namun bagi sebagian masyarakat yang membuka usaha atau pekerjaan wiraswasta dimana faktor kerugian yang dirasakan jika mereka ikut serta dalam pemilihan bupati menjadi pertimbangan mereka sehingga tidak ikut serta berpartisipasi dalam pilkada.
4. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para calon maupun partai politik pengusung

mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang siapa dan apa visi-misi yang ingin dilaksanakan jika para calon berhasil memenangkan pilkada, sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak politik yang mereka miliki atau bisa dikatakan mereka tidak mau membeli kucing dalam karung.

5. Faktor administrasi mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pelalawan diakibatkan oleh beberapa alasan seperti: banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, masyarakat yang pindah tempat tinggal namun masih terdaftar dalam DPT dan ada masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Ini sebenarnya adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak baik itu penyelenggara pilkada maupun masyarakat itu sendiri. Namun tugas ini lebih ditanggungkan kepada penyelenggara pemilu terutama ketua RT dimana ia sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pilkada didaerahnya.

B. Saran

1. Penyelenggara pemilu. Sebaiknya KPU dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menghimbau kepada jajarannya agar melakukan pendataan secara akurat dan menghimbau kepada para ketua RT agar memberikan surat undangan kepada masyarakat yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan bupati.
2. Partai politik Partai politik dalam mengusung calon seharusnya mengusung calon yang benar-benar mempunyai kredibilitas atau calon yang benar-benar mempunyai sepak terjang yang baik dimata

masyarakat, sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemilihan bupati akan tinggi dan ini tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.

3. Calon Bupati Siapapun yang duduk sebagai bupati sebaiknya mereka segera menepati janji-janji mereka saat sosialisasi/kampanye agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin/pemerintah semakin tinggi dan juga diharapkan bupati terpilih mau turun langsung ke masyarakat dan melihat sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemimpin yang mereka pilih memang benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Sehingga untuk pemilihan kepala daerah berikutnya tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Arianto, Bismar, 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 51-60
- Budiardjo, M. (2007). *dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS.
- Joeniarso. (1990). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Lisa, H. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Ibnu Kencana.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nelson, S. P. (1990). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanit, A. (1992). *Aneka Pandangan Fenomena Politik Ketidakikutsertaan (golput)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Surbakti, R. (2010). *memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Susanta. (2005). *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FISIP UPN "VETERAN".
- Yusran, A. Y. (2005). *Ilmu Politik:Paradigma,Makna, dan Konsep Sistem*. Riau: Suska Press&Red-Post Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang 'Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2015 Sebagai Hari Libur Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber Lainnya

- Asfar Muhammad. 1996. Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih, *Jurnal Ilmu*

Politik Edisi No 16. Jakarta : PT
Gramedi Pustaka Utama

Saleh, Hasanuddin M. 2007. ‘’ Perilaku
Tidak Memilih dalam Pemilihan
Kepala Daerah Langsung Di Riau:
Suatu Bahasan Awal’’, Makalah
Seminar program Studi Ilmu
Politik Pasca Sarjana Universitas
Riau (2 September 2007)

D. Website

www.isi.com. Ketidakikutsertaan (golput)
Dalam Pilkada, kajian Bulanan LSI
Edisi 05-September 2007, oleh
Eriyanto

www.RiauBERNAS.com

www.KabPelalawan.go.id